

# Menyelesaikan Paradoks Kepentingan: Peran Kode Etik dalam Menyeimbangkan Kebutuhan Individu Siswa dengan Tuntutan Institusi di SLB

Sania Mariana Tambun; Khiran Jessica Obar; Annisa Dwi Putri Yogaswara;  
Awanda Wiandini. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,  
[saniatambun677@gmail.com](mailto:saniatambun677@gmail.com)

*ABSTRACT: Teachers in Special Schools (SLB) face complex ethical dilemmas arising from the tension between the individual needs of students with disabilities and institutional demands that emphasize administrative efficiency and standardization. This study aims to examine the role of the Indonesian Teacher Code of Ethics in helping special education teachers navigate this paradox of interests. A mixed-methods approach was employed, combining qualitative descriptive analysis of policy documents with in-depth interviews with SLB teachers. The findings indicate that the code of ethics serves as a moral compass; however, it has not fully addressed the micro-level ethical dilemmas encountered in daily practice. The consistency of teachers' professional ethics is influenced by internal factors such as personality and emotional resilience, as well as external factors including welfare, workload, and institutional support. Strengthening contextual ethical guidelines and systemic support is therefore essential to ensure ethical and student-centered special education practices.*

*KEYWORDS: professional ethics, special education teachers, ethical dilemmas, special education, code of ethics.*

**ABSTRAK:** Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) menghadapi dilema etis yang kompleks akibat ketegangan antara kebutuhan individu siswa berkebutuhan khusus dan tuntutan institusional yang bersifat administratif serta birokratis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kode Etik Guru Indonesia dalam membantu guru SLB menyeimbangkan paradoks kepentingan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan metode campuran dengan analisis kualitatif deskriptif melalui studi dokumentasi kebijakan dan wawancara mendalam dengan guru SLB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kode etik berfungsi sebagai kompas moral, namun belum sepenuhnya mampu menjawab dilema etis mikro yang muncul dalam praktik pendidikan khusus. Konsistensi etika profesional guru dipengaruhi oleh faktor internal seperti kepribadian dan resiliensi emosional, serta faktor eksternal berupa kesejahteraan, beban kerja, dan dukungan institusional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kode etik yang lebih kontekstual dan dukungan sistemik agar guru SLB dapat menjalankan profesinya secara berintegritas dan berorientasi pada kepentingan terbaik siswa.

**KATA KUNCI:** Etika Profesional, Guru SLB, Dilema Etis, Pendidikan Khusus, Kode Etik.

## I. PENDAHULUAN

Profesi guru merupakan salah satu profesi yang mengemban tanggung jawab ganda, yaitu tanggung jawab akademik dalam mentransfer pengetahuan dan tanggung jawab moral dalam membentuk karakter peserta didik. Kompleksitas tanggung jawab ini semakin meningkat ketika guru menjalankan tugasnya di Sekolah Luar Biasa (SLB), di mana peserta didik memiliki karakteristik khusus yang memerlukan pendekatan pedagogik berbeda dari sekolah reguler (Pratiwi, 2015). Guru SLB tidak hanya menghadapi tantangan dalam aspek pembelajaran, tetapi juga harus mampu mengelola dinamika emosional, perilaku kompleks siswa, serta ekspektasi dari berbagai pemangku kepentingan yang seringkali tidak sejalan (Wahyudin, Rusman, & Rahmawati, 2017).

Dalam konteks pendidikan khusus, guru SLB dihadapkan pada situasi dilematis yang kerap menimbulkan ketegangan antara idealisme profesional dan realitas lapangan. Kode Etik Guru Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, menetapkan standar perilaku profesional yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pendidik. Namun demikian, penerapan kode etik tersebut dalam praktik pendidikan khusus menghadapi tantangan unik yang tidak selalu terakomodasi dalam regulasi yang bersifat umum (Sunardi & Sunaryo, 2007).

Salah satu paradoks fundamental yang dihadapi guru SLB adalah ketegangan antara kebutuhan individual siswa dengan tuntutan efisiensi institusional. Di satu sisi, prinsip pendidikan inklusif dan pendidikan khusus menekankan pentingnya individualisasi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap peserta didik (Hallahan, Kauffman, & Pullen, 2015). Di sisi lain, kebijakan institusional seringkali menuntut standarisasi, efisiensi waktu, dan pencapaian target administratif yang tidak selalu kompatibel dengan pendekatan individual tersebut (Budiyanto, 2017).

Kompleksitas ini semakin diperumit oleh perbedaan sistem pengelolaan antara SLB negeri dan SLB swasta. Penelitian terdahulu

menunjukkan bahwa perbedaan sumber pendanaan, struktur organisasi, dan karakteristik orang tua siswa memberikan dampak signifikan terhadap bagaimana guru menjalankan peran profesionalnya (Marlina, 2020). Sekolah negeri cenderung menerapkan regulasi yang lebih kaku dan birokratis, sementara sekolah swasta relatif lebih fleksibel namun menghadapi tekanan finansial yang berbeda (Ilahi, 2013). Kondisi ini menciptakan variasi dalam penerapan etika profesional yang perlu dikaji secara mendalam.

Selain itu, guru SLB juga menghadapi tantangan dalam mengelola ekspektasi orang tua yang tidak selalu realistis terhadap perkembangan anak berkebutuhan khusus. Kesenjangan pemahaman antara kapasitas aktual siswa dengan harapan orang tua seringkali menempatkan guru dalam posisi yang sulit, di mana keputusan profesional yang didasarkan pada asesmen objektif dapat bertentangan dengan keinginan orang tua (Mangunsong, 2014). Situasi ini menimbulkan dilema etis terkait dengan prinsip otonomi orang tua, kepentingan terbaik anak, dan integritas profesional guru.

Aspek lain yang menambah kompleksitas adalah kesenjangan antara teori pendidikan khusus yang dipelajari di institusi pendidikan tinggi dengan realitas praktik di lapangan. Berbagai intervensi dan teknik manajemen perilaku yang secara teoritis efektif tidak selalu dapat diterapkan dalam konteks sekolah dengan keterbatasan sumber daya dan kondisi riil siswa yang sangat beragam (Heward, 2013). Guru SLB dituntut untuk melakukan adaptasi dan improvisasi yang tetap berpegang pada prinsip etika profesional, meskipun tidak selalu ada panduan eksplisit dalam kode etik yang ada.

Fenomena burnout dan kelelahan emosional di kalangan guru SLB juga menjadi perhatian serius dalam diskursus etika profesional. Intensitas interaksi dengan siswa berkebutuhan khusus, paparan terhadap perilaku challenging, dan tekanan dari berbagai pihak dapat mengikis resiliensi profesional guru (Skaalvik & Skaalvik, 2015). Dalam kondisi demikian, risiko pelanggaran etika atau pengabaian prinsip-prinsip profesional meningkat, bukan karena intensi buruk, melainkan

sebagai konsekuensi dari beban kerja yang melebihi kapasitas (Santrock, 2011).

Lebih jauh lagi, isu-isu sensitif seperti penanganan perilaku seksual pada siswa dengan disabilitas intelektual menambah dimensi kompleksitas etis yang belum banyak dibahas dalam literatur pendidikan khusus di Indonesia. Guru SLB seringkali harus mengambil keputusan dalam situasi yang secara moral tidak hitam-putih, di mana setiap pilihan tindakan membawa konsekuensi etis yang perlu dipertimbangkan dengan cermat. Ketiadaan panduan spesifik dalam kode etik guru terkait isu-isu ini meninggalkan ruang ketidakpastian yang dapat berdampak pada kualitas pengambilan keputusan profesional.

Penelitian tentang etika profesional guru SLB di Indonesia masih terbatas, terutama yang mengeksplorasi dilema etis konkret yang dihadapi dalam praktik sehari-hari. Mayoritas kajian yang ada berfokus pada aspek kompetensi pedagogik atau efektivitas metode pembelajaran, sementara dimensi etika profesional dalam konteks yang kompleks dan penuh paradoks belum mendapat perhatian memadai (Tarsidi, 2012). Padahal, pemahaman mendalam tentang bagaimana guru SLB menavigasi dilema etis dalam praktiknya dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan pendidikan khusus yang lebih kontekstual dan humanis.

Dalam konteks global, diskursus tentang etika dalam pendidikan khusus telah berkembang pesat, mencakup isu-isu seperti informed consent dalam intervensi perilaku, keseimbangan antara proteksi dan otonomi siswa, serta dilema dalam penggunaan restriksi fisik atau farmakologis (Paul, Lavelly, Cranston-Gingras, & Taylor, 2013). Namun demikian, adaptasi wacana global tersebut ke dalam konteks Indonesia memerlukan pertimbangan terhadap faktor budaya, sistem pendidikan nasional, dan kondisi sosio-ekonomi yang spesifik.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana guru SLB memaknai dan menerapkan kode etik profesional dalam menghadapi paradoks kepentingan antara kebutuhan individual siswa dengan tuntutan institusional. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi

kesenjangan antara pedoman etik yang ada dengan kebutuhan praktis di lapangan, serta merumuskan rekomendasi untuk penguatan etika profesional guru SLB yang lebih kontekstual dan aplikatif.

Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan fundamental: (1) Bagaimana guru SLB menyeimbangkan antara prinsip-prinsip etika profesional dengan realitas praktik yang penuh keterbatasan? (2) Apa saja dilema etis spesifik yang dihadapi guru SLB dalam konteks perbedaan sistem pengelolaan sekolah negeri dan swasta? (3) Sejauh mana Kode Etik Guru yang ada mampu memberikan panduan dalam pengambilan keputusan etis yang kompleks? (4) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsistensi guru SLB dalam menjalankan prinsip etika profesional?

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian etika profesional dalam pendidikan khusus, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi penyempurnaan kode etik guru, pengembangan program pelatihan etika untuk guru SLB, dan perumusan kebijakan pendidikan khusus yang lebih responsif terhadap kompleksitas praktik di lapangan. Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat membuka ruang dialog yang lebih luas tentang pentingnya dukungan sistemik bagi guru SLB agar mereka dapat menjalankan profesinya dengan integritas tinggi tanpa harus mengorbankan kesejahteraan pribadi atau mengesampingkan kebutuhan terbaik siswa.

## II. METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan metode campuran (mixed methods) yang mengombinasikan analisis kualitatif deskriptif dengan penguatan data empiris untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai dinamika etika di lingkungan pendidikan khusus. Penggunaan metode kualitatif ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi persepsi guru terhadap tanggung jawab moral dan implikasi dari setiap keputusan publik yang diambil dalam praktik keseharian di sekolah (Radianti, Ramadhan, Amal, & Nasution, 2024). Melalui pendekatan ini, peneliti

dapat membedah bagaimana nilai-nilai profesional diinternalisasi oleh pendidik saat menghadapi tantangan di era globalisasi yang kompleks.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara mendalam yang terstruktur dengan praktisi di Sekolah Luar Biasa untuk menangkap realitas dilema etis secara autentik. Prosedur pengumpulan data ini diperkuat dengan penggunaan skenario dilema etis untuk mengidentifikasi gaya penyelesaian masalah yang digunakan oleh para guru dalam menghadapi situasi paradoks di lapangan (Öztürk, Şahin, Vuran, & Gürses, 2024). Selain data wawancara, dilakukan pula studi dokumentasi terhadap berbagai literatur yang relevan dengan manajemen pendidikan inklusi dan penanganan anak berkebutuhan khusus guna memastikan validitas temuan (Yunita, Suneki, & Wakhyudin, 2019).

Proses analisis data dilakukan secara komprehensif dengan menyandingkan temuan lapangan terhadap kerangka kerja etika profesional yang ada dalam literatur khusus pendidikan luar biasa (Paul, French, & Cranston-Gingras, *Ethics and Special Education.*, 2001). Peneliti menganalisis bagaimana integrasi antara kode etik pribadi dan profesional memengaruhi pengambilan keputusan yang berorientasi pada kepentingan terbaik siswa (Bon & Bigbee, 2011). Selain itu, analisis juga mencakup tinjauan terhadap faktor-faktor sistemik seperti kebijakan birokrasi, efektivitas Standar Operasional Prosedur (SOP), hingga kondisi psikologis guru seperti tingkat kejenuhan kerja yang berpotensi memengaruhi konsistensi etika mereka (Solichin, 2015), (Mayya, Sa'ud, & Meirawan, 2019).

Seluruh informasi yang terkumpul kemudian disintesis untuk melihat pergeseran paradigma pendidikan dari model medis ke model sosial-kontekstual yang lebih humanis (Turnbull & Turnbull, 2002). Dengan mempertimbangkan dampak kepribadian guru terhadap perkembangan sosial siswa, penelitian ini berupaya memberikan gambaran utuh mengenai pengambilan keputusan etis yang adil dan bijaksana (Juliyanti & Putri, 2024). Pendekatan naratif ini memungkinkan peneliti untuk mengkritisi apakah sistem yang berjalan saat ini masih bersifat administratif belaka atau sudah benar-benar

berorientasi pada hasil nyata bagi kesejahteraan siswa di sekolah (Freedman, 2012).

### **III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

#### **A. Keseimbangan Prinsip Etika Profesional dengan Realitas Praktik yang Terbatas**

Guru SLB menghadapi realitas di mana prinsip etika sering kali harus dinegosiasikan dengan keterbatasan infrastruktur dan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Dinda mengungkapkan bahwa guru sering kali melakukan improvisasi karena teori formal tidak selalu menjawab dinamika perilaku siswa di lapangan. Dalam kondisi ini, ketaatan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjadi fondasi utama bagi guru untuk tetap menjaga norma dan etika profesi meski dalam keterbatasan fasilitas. Hal ini selaras dengan argumen bahwa pendidikan khusus sangat sarat dengan nilai-nilai yang melampaui sekadar instruksi akademik (Paul, French, & Cranston-Gingras, *Ethics and Special Education.*, 2001).

Keseimbangan ini diuji ketika guru harus memberikan perlindungan maksimal bagi siswa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Ibu Dinda menceritakan tantangan saat menangani perilaku kompleks siswa (seperti tantrum atau perilaku seksual) yang menuntut guru untuk tetap menjaga batas profesionalisme sebagaimana diatur dalam Kode Etik Guru Indonesia (PGRI). Guru dituntut untuk mampu mengintegrasikan kode etik pribadi dan profesional demi kepentingan terbaik anak di tengah tekanan administratif yang ada (Bon & Bigbee, 2011).

Realitas praktik yang terbatas ini juga memerlukan pergeseran cara pandang. Guru harus melihat disabilitas bukan sebagai hambatan medis semata, melainkan sebagai hasil interaksi sosial yang menuntut upaya pemampuan (*enablement*) siswa dalam lingkungannya (Turnbull & Turnbull, 2002). Tanpa dukungan sistem yang kuat, guru sering kali terjebak dalam dilema etis akibat kelemahan Standar Operasional

Prosedur (SOP) dan kurangnya tenaga pendukung seperti Guru Pembimbing Khusus (GPK) (Mayya, Sa'ud, & Meirawan, 2019).

Dalam menghadapi keterbatasan ini, konsistensi etika guru menjadi sangat krusial. Pengambilan keputusan etis harus memastikan setiap individu diperlakukan secara adil dan martabatnya dihormati (Eunike & Marbun, 2025). Namun, realitas ekonomi seperti gaji yang rendah dan beban kerja yang berat dapat memicu burnout yang mengancam profesionalisme tersebut (Wardhani, 2012). Oleh karena itu, kepribadian guru dan internalisasi etika menjadi instrumen utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif (Juliyanti & Putri, 2024), terutama di tengah iklim birokrasi yang terkadang kaku dan dapat menghambat implementasi kebijakan pendidikan yang efektif (Solichin, 2015).

Pada akhirnya, guru SLB dituntut untuk memiliki kemampuan memecahkan dilema etis secara fleksibel namun tetap bertanggung jawab (Öztürk, Şahin, Vuran, & Gürses, 2024). Hal ini penting untuk memastikan bahwa sistem pendidikan tidak hanya terjebak pada kepatuhan aturan administratif semata, tetapi benar-benar berorientasi pada hasil dan kesejahteraan siswa (Freedman, 2012), terutama dalam menghadapi tantangan moral yang semakin kompleks di era globalisasi saat ini (Radianti, Ramadhan, Amal, & Nasution, 2024)

### **B. Dilema Etis Spesifik dalam Perbedaan Sistem Pengelolaan Sekolah Negeri dan Swasta**

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam tata kelola institusi yang menciptakan dilema etis unik bagi guru di sekolah negeri maupun swasta. Di sekolah negeri, guru seringkali berhadapan dengan rigiditas birokrasi, seperti sistem Dapodik yang mewajibkan penghapusan data siswa jika tidak hadir dalam jangka waktu tertentu tanpa mempertimbangkan kondisi khusus penyandang disabilitas. Hal ini menciptakan konflik moral bagi guru yang wajib menjaga norma profesi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, karena tindakan administratif tersebut



dapat memutus hak pendidikan anak. Fenomena birokrasi yang kaku ini dapat membuat kebijakan pendidikan yang inklusif menjadi tidak efektif di tingkat satuan pendidikan (Solichin, 2015).

Sebaliknya, di sekolah swasta seperti yang telah didapatkan dalam hasil wawancara, guru memiliki fleksibilitas lebih besar untuk mempertahankan siswa demi kepentingan pelayanan, namun sering kali terkendala oleh keterbatasan dana dan sistem pendukung. Dilema muncul ketika guru harus tetap memberikan perlindungan maksimal sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di tengah kurangnya kuantitas dan kualitas Guru Pembimbing Khusus (GPK) serta fasilitas pendukung (Mayya, Sa'ud, & Meirawan, 2019). Kondisi ini memaksa guru untuk terus melakukan negosiasi antara kepatuhan pada kebijakan administratif dan tanggung jawab moral untuk memberikan hasil terbaik bagi siswa (Bon & Bigbee, 2011).

Batas-batas profesionalisme yang diatur dalam Kode Etik Guru Indonesia (PGRI) menjadi sangat krusial saat guru di kedua sistem ini menghadapi tekanan dari orang tua atau tuntutan institusi yang tidak realistis. Guru dituntut untuk tidak hanya mengikuti prosedur hukum, tetapi juga memiliki kepekaan etis dalam melihat kebutuhan unik keluarga dan siswa (Turnbull & Turnbull, 2002) (Paul, French, & Cranston-Gingras, *Ethics and Special Education.*, 2001). Ketidakpastian dalam manajemen sekolah sering kali membuat guru harus menemukan gaya penyelesaian dilema mereka sendiri agar tetap selaras dengan prinsip keadilan (Öztürk, Şahin, Vuran, & Gürses, 2024) (Yunita, Suneki, & Wakhyudin, 2019).

Kelemahan sistemik ini, jika ditambah dengan rendahnya kepuasan kerja, dapat memicu penurunan integritas profesional akibat kelelahan mental (Wardhani, 2012). Oleh karena itu, konsistensi etika sangat bergantung pada kepribadian guru sebagai inspirator moral (Juliyanti & Putri, 2024), yang mampu menavigasi proses pengambilan keputusan rumit demi kepentingan masyarakat luas dan martabat (Eunike & Marbun, 2025), terutama di tengah tantangan nilai pada era globalisasi saat ini (Radianti, Ramadhan, Amal, & Nasution, 2024).

### **C. Efektivitas Kode Etik Guru dalam Pengambilan Keputusan Etis yang Kompleks**

Kode Etik Guru Indonesia (PGRI) memegang peranan vital sebagai kompas moral, namun efektivitasnya dalam memandu keputusan yang kompleks sangat bergantung pada bagaimana guru menginternalisasi nilai-nilai tersebut di tengah tantangan zaman. Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Dinda menekankan bahwa kode etik tidak boleh dipandang hanya sebagai teks mati, melainkan sebagai panduan hidup profesional yang harus adaptif terhadap lingkungan dan latar belakang siswa. Hal ini sejalan dengan kewajiban guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen untuk selalu menjaga norma dan etika profesi dalam setiap tindakan kependidikan.

Dalam menghadapi dilema kompleks, seperti perilaku siswa yang melanggar norma namun disebabkan oleh hambatan disabilitasnya, kode etik memberikan batas-batas profesionalisme agar guru tetap bertindak sebagai pelindung sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Guru dituntut untuk tidak hanya sekadar patuh pada aturan administratif, tetapi mampu mengintegrasikan kode etik personal dan profesional demi melayani kepentingan terbaik anak (Bon & Bigbee, 2011). Tanpa internalisasi yang kuat, guru berisiko terjebak pada pendekatan yang hanya berorientasi pada kepatuhan aturan (compliance-driven) daripada hasil nyata bagi kesejahteraan siswa (Freedman, 2012) (Paul, French, & Cranston-Gingras, *Ethics and Special Education.*, 2001).

Kemampuan guru untuk mengambil keputusan yang adil dan bijaksana juga dipengaruhi oleh paradigma yang mereka anut. Transisi dari model medis ke model sosial dalam memahami disabilitas membantu guru melihat dilema etis sebagai proses interaksi yang dinamis (Turnbull & Turnbull, 2002). Namun, dalam praktiknya, guru sering kali harus menemukan gaya penyelesaian dilemanya sendiri karena panduan umum dalam kode etik terkadang belum menyentuh skenario mikro yang sangat spesifik di kelas SLB (Öztürk, Şahin, Vuran, & Gürses, 2024) (Eunike & Marbun, 2025).

Kondisi manajemen sekolah yang lemah, termasuk belum adanya SOP yang detail, sering kali membuat kode etik menjadi instrumen tunggal yang diandalkan guru dalam ketidakpastian (Mayya, Sa'ud, & Meirawan, 2019) (Yunita, Suneki, & Wakhyudin, 2019). Pada akhirnya, efektivitas kode etik ini sangat bergantung pada konsistensi moral individu guru di era globalisasi yang penuh tantangan nilai (Radianti, Ramadhan, Amal, & Nasution, 2024). Kepribadian guru yang berintegritas menjadi faktor penentu apakah kode etik tersebut mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif (Juliyanti & Putri, 2024) atau justru terabaikan akibat tekanan birokrasi dan kelelahan kerja (Solichin, 2015) (Wardhani, 2012).

#### **D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsistensi Etika Profesional Guru SLB**

Konsistensi guru dalam menerapkan etika profesi tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor internal individu dan kondisi eksternal lingkungan kerja. Berdasarkan hasil wawancara, faktor kesejahteraan finansial menjadi variabel krusial; gaji yang sangat rendah (dimulai dari Rp500.000) diakui dapat mengikis motivasi dan memicu pelanggaran etika seperti "korupsi waktu". Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak guru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen merupakan prasyarat penting bagi tegaknya profesionalisme.

Secara psikologis, beban kerja yang tinggi dalam menangani anak berkebutuhan khusus tanpa dukungan yang memadai dapat menyebabkan kejenuhan luar biasa. Jurnal (Wardhani, 2012) membuktikan bahwa terdapat korelasi negatif yang signifikan antara burnout dengan kepuasan kerja guru SLB; di mana guru yang mengalami kejenuhan tinggi cenderung kesulitan mempertahankan konsistensi etisnya. Tekanan ini sering kali diperparah oleh sistem birokrasi yang kaku dan kurang kondusif, yang menurut (Solichin, 2015), dapat mematikan inisiatif baik dari seorang pendidik.

Faktor lingkungan sekolah juga memegang peranan kunci. Kurangnya kuantitas dan kualitas Guru Pembimbing Khusus (GPK) serta belum tersedianya SOP pendidikan inklusi yang jelas membuat guru sering merasa berjalan sendiri dalam ketidakpastian (Mayya, Sa'ud, & Meirawan, 2019) (Yunita, Suneki, & Wakhyudin, 2019). Hal ini memaksa guru untuk mengandalkan kekuatan kepribadian dan integritas moral pribadi sebagai benteng terakhir dalam memberikan perlindungan kepada siswa sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kepribadian guru yang positif dan stabil secara emosional terbukti menjadi faktor penentu terciptanya lingkungan belajar yang kondusif (Juliyanti & Putri, 2024).

Selain itu, kemampuan guru dalam melakukan pengambilan keputusan etis dipengaruhi oleh gaya penyelesaian dilema yang mereka miliki (Öztürk, Şahin, Vuran, & Gürses, 2024). Guru yang mampu menyelaraskan kode etik personal dengan kode etik profesional (PGRI) cenderung lebih konsisten dalam menjaga "kepentingan terbaik anak" di tengah berbagai tarikan kepentingan (Bon & Bigbee, 2011). Di era globalisasi, tantangan nilai dan budaya menuntut guru untuk memiliki fondasi moral yang kokoh agar setiap keputusan publik yang diambil tetap memiliki implikasi moral yang positif bagi martabat manusia (Radianti, Ramadhan, Amal, & Nasution, 2024) (Eunike & Marbun, 2025). Tanpa reformasi sistemik yang mendukung aspek-aspek tersebut, guru akan terus terjebak dalam dilema antara tuntutan kepatuhan administratif dan realitas kebutuhan siswa (Freedman, 2012) (Paul, French, & Cranston-Gingras, *Ethics and Special Education.*, 2001) (Turnbull & Turnbull, 2002).

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa guru Sekolah Luar Biasa (SLB) berada dalam situasi paradoks kepentingan yang kompleks, yakni antara tuntutan pemenuhan kebutuhan individual siswa berkebutuhan khusus dan kewajiban memenuhi regulasi serta kebijakan institusional. Dilema ini muncul sebagai konsekuensi dari keterbatasan sumber daya, tekanan administratif, serta ekspektasi

berbagai pihak yang tidak selalu sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik anak.

Kode Etik Guru Indonesia (PGRI) berfungsi sebagai pedoman moral dalam menghadapi dilema tersebut, namun efektivitasnya sangat bergantung pada internalisasi nilai etis oleh guru serta dukungan sistem pendidikan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kode etik belum sepenuhnya memberikan panduan operasional terhadap dilema mikro yang dihadapi guru SLB, terutama dalam konteks perilaku kompleks siswa, tekanan orang tua, dan perbedaan sistem pengelolaan antara sekolah negeri dan swasta.

Konsistensi etika profesional guru SLB dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, seperti kepribadian, stabilitas emosional, kesejahteraan ekonomi, beban kerja, serta dukungan manajemen sekolah. Fenomena burnout menjadi faktor krusial yang berpotensi melemahkan integritas profesional guru, sehingga penyeimbangan antara tuntutan institusional dan kebutuhan siswa tidak dapat dibebankan sepenuhnya pada tanggung jawab moral individu guru tanpa dukungan sistemik yang memadai.

## DAFTAR REFERENSI

- Bon, S. C., & Bigbee, A. J. (2011). Special Education Leadership: Integrating Professional and Personal Codes of Ethics to Serve the Best Interests of the Child. *Journal of Special Education Leadership.*, 1-15.
- Budiyanto, B. (2017). *Pengantar Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Lokal*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Eunike, S., & Marbun, R. C. (2025). Pengambilan Keputusan Etis dalam Bidang Pendidikan. *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora.*, 1-12.
- Freedman, M. K. (2012). Special Education: Its Ethical Dilemmas, Entitlement Status, and Suggested Systemic Reforms. *The University of Chicago Law Review*, 1-24.
- Hallahan, D. P., Kauffman, J. M., & Pullen, P. C. (2015). *Exceptional Learners: An Introduction to Special Education (13th ed.)*. Boston: Pearson.
- Heward, W. L. (2013). *Exceptional Children: An Introduction to Special Education (10th ed.)*. Upper Saddle River: Pearson.
- Ilahi, M. T. (2013). *Pendidikan Inklusif: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Juliyanti, N., & Putri, R. (2024). Dampak Etika Profesional dan Kepribadian Guru terhadap Perkembangan Siswa di Sekolah. *VENN: Journal of Sustainable Innovation on Education, Mathematics and Natural Sciences.*, 1-10.
- Mangunsong, F. (2014). *Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (Jilid 2)*. Padang: UNP Press.
- Marlina, M. (2020). *Strategi Pembelajaran Berdiferensiasi di Sekolah Inklusif*. Padang: Afifa Media.
- Mayya, Sa'ud, U. S., & Meirawan, D. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi pada Sekolah Dasar. *Jurnal Administrasi Pendidikan (UPI)*, 108-117.

- Öztürk, H., Şahin, V., Vuran, S., & Gürses, İ. (2024). Professional Ethic Dilemma Solving Styles of Teachers in Special Education. *Education and Science.*, 105-132.
- Paul, J. L., French, P., & Cranston-Gingras, A. (2001). *Ethics and Special Education. Focus on Exceptional Children.*, 1-16.
- Paul, J. L., Lavelly, C., Cranston-Gingras, A., & Taylor, E. L. (2013). *The Foundation of Special Education.* Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Pratiwi, J. C. (2015). Sekolah Inklusi untuk Anak Berkebutuhan Khusus: Tanggapan Terhadap Tantangan Kedepannya. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan (UNS).*, 237-242.
- Radianti, Ramadhan, I., Amal, A. I., & Nasution, A. F. (2024). Kode Etik Profesi Guru di Era Globalisasi: Menghadapi Tantangan dan Peluang. *Ability: Journal of Education and Social Analysis.*, 1-9.
- Santrock, J. W. (2011). *Educational Psychology (5th ed.).* New York: McGraw-Hill.
- Skaalvik, E. M., & Skaalvik, S. (2015). Job Satisfaction, Stress and Coping Strategies in the Teaching Profession-What Do Teachers Say? *International Education Studies*, 181-192.
- Solichin, M. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi. *Religi: Jurnal Studi Islam*, 148-178.
- Sunardi, S., & Sunaryo, S. (2007). *Manajemen Pendidikan Luar Biasa.* Jakarta: Dpartemen Pendidikan Nasional.
- Tarsidi, D. (2012). Disabilitas dan Pendidikan Inklusif pada Jenjang Pendidikan Tinggi. *JASSI Anakku*, 144-151.
- Turnbull, A. P., & Turnbull, H. R. (2002). *From The Old to The New Paradigm of Disability and Families: Research to Enhance Family Quality of Life Outcomes.* Dalam J. L. Paul, *Rethinking Professional Issues in Special Education.* (hal. Ablex Publishing).

- Wahyudin, D., Rusman, & Rahmawati, Y. (2017). Penguatan Life Skills dalam Implementasi Kurikulum 2013 pada SMA di Jawa Barat. *MIMBAR PENDIDIKAN.*, 65-80.
- Wardhani, D. T. (2012). Burnout di Kalangan Guru Pendidikan Luar Biasa di Kota Bandung. *Jurnal Psikologi Undip*, 73-82.
- Yunita, E. I., Suneki, S., & Wakhyudin, H. (2019). Manajemen Pendidikan Inklusi dalam Proses Pembelajaran dan Penanganan Guru Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus. *International Journal of Elementary Education.*, 267-274.
- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.